

BAB I

PENDAHULUAN

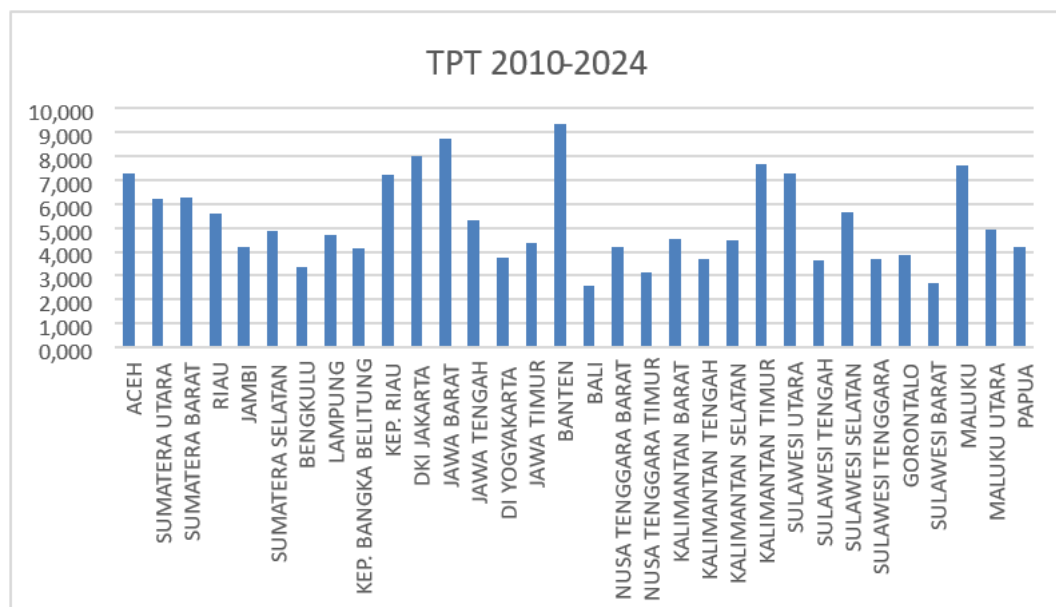
1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan angkatan kerja yang terus-menerus seiring berjalannya waktu menuntut perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai guna mengimbangi perluasan tersebut. Namun, kapasitas berbagai sektor ekonomi dalam menciptakan peluang kerja tidak selalu tumbuh secara selaras. Ketika penciptaan lapangan kerja tertinggal dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja, sebagian tenaga kerja berisiko tetap menganggur. Kesenjangan antara kualifikasi tenaga kerja dan tuntutan pasar kerja dapat semakin meningkatkan kemungkinan terjadinya pengangguran. Akibatnya, persoalan ketenagakerjaan khususnya pengangguran menjadi tantangan krusial bagi pembangunan ekonomi (Keynes, 1936).

Pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi yang masih banyak dihadapi di berbagai daerah. Tingginya tingkat pengangguran dapat menurunkan pendapatan masyarakat, meningkatkan kerentanan sosial, dan memperlebar kesenjangan ekonomi. Selain itu, banyaknya tenaga kerja yang belum terserap menunjukkan bahwa sumber daya manusia belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga dapat menghambat pembangunan ekonomi. Tingkat pengangguran tidak hanya menggambarkan kondisi pasar kerja, tetapi juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan perekonomian dan menilai keberhasilan kebijakan pembangunan di suatu daerah (Khoiriyah et al., 2025).

Di Indonesia, permasalahan pengangguran masih menjadi tantangan dalam proses pembangunan meskipun kondisi perekonomian nasional menunjukkan perkembangan yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah angkatan kerja yang terus meningkat belum sepenuhnya diimbangi oleh ketersediaan lapangan kerja yang memadai, sehingga masih terdapat tenaga kerja yang belum dapat terserap secara optimal. Selain itu, perbedaan kondisi antarwilayah serta karakteristik struktur perekonomian daerah menyebabkan tingkat pengangguran di Indonesia menunjukkan variasi yang cukup besar. Kondisi tersebut menjadikan pengangguran sebagai isu penting yang perlu terus dikaji dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk menggambarkan kondisi pengangguran secara empiris di setiap wilayah, salah satu indikator yang umum digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Khoiriyah et al., 2025).

Gambar 1. 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2010-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2010-2024 (Data Diolah)

Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada setiap provinsi di Indonesia, terlihat adanya perbedaan tingkat pengangguran antarwilayah yang cukup jelas. Sejumlah provinsi menunjukkan tingkat pengangguran yang cenderung lebih tinggi dibandingkan provinsi lain, sementara sebagian wilayah memperlihatkan tingkat pengangguran yang lebih rendah. Perbedaan itu mencerminkan variasi kondisi ekonomi dan kemampuan absorpsi tenaga kerja di setiap daerah. Di samping itu, perkembangan TPT dalam beberapa tahun terakhir juga memperlihatkan adanya variasi, yang menunjukkan bahwa masalah pengangguran di Indonesia bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai keadaan ekonomi. Temuan ini menekankan bahwa pengangguran tetap menjadi masalah serius yang harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan pembangunan bagi negara (Khoiriyah et al., 2025).

Setelah melihat gambaran umum Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia, penting untuk dipahami bahwa tinggi rendahnya TPT berkaitan erat dengan kondisi aktivitas perekonomian. Tingkat pengangguran dipengaruhi oleh kondisi permintaan agregat, di mana permintaan agregat yang tidak memadai akan menyebabkan dunia usaha mengurangi kapasitas produksi sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi terbatas (Keynes, 1936). Karena ketika permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, dunia usaha cenderung memperluas produksi sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja ikut meningkat dan TPT dapat menurun. Sebaliknya, lemahnya permintaan agregat akan menahan ekspansi produksi dan berdampak pada terbatasnya penyerapan tenaga kerja. Perlambatan kegiatan ekonomi berkontribusi terhadap kenaikan angka pengangguran, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia (ILO, 2023).

Secara empiris, keterkaitan antara inflasi dan tingkat pengangguran masih menjadi salah satu isu penting dalam kajian makroekonomi. Hubungan tersebut dijelaskan melalui Kurva Phillips yang menyatakan adanya hubungan jangka pendek yang bersifat negatif antara inflasi dan pengangguran. Ketika permintaan agregat meningkat, tekanan terhadap harga cenderung mendorong kenaikan inflasi yang diikuti oleh peningkatan output dan penyerapan tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran menurun (Mankiw, 2019). Meskipun kekuatan hubungan tersebut dapat berbeda antarnegara maupun antarperiode, berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa inflasi tetap memiliki keterkaitan dengan dinamika pasar tenaga kerja. Inflasi layak digunakan sebagai salah satu variabel independen dalam menganalisis Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Selain dipengaruhi oleh kondisi harga, penyerapan tenaga kerja juga ditentukan oleh keberlanjutan aktivitas produksi yang sangat bergantung pada keputusan pelaku ekonomi untuk memperluas kapasitas usaha. Salah satu faktor penting yang mendorong perluasan kapasitas tersebut adalah investasi.

Peningkatan investasi tersebut mendorong bertambahnya kegiatan produksi serta memperluas skala usaha, sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja ikut meningkat (Clark, 1917). Kondisi ini berpotensi menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, ketika investasi melemah, ekspansi usaha menjadi terbatas dan penciptaan lapangan kerja melambat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan TPT tetap tinggi. Investasi berperan sebagai penghubung antara aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, sejalan dengan pandangan Keynesian yang menekankan pentingnya permintaan agregat (Syach et al., 2022).

Selain investasi yang dilakukan oleh sektor swasta, aktivitas perekonomian juga sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah dalam mendorong dan menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi. Ketika dinamika perekonomian belum sepenuhnya mampu menciptakan kesempatan kerja yang memadai, pengeluaran pemerintah menjadi instrumen penting untuk menstimulasi aktivitas ekonomi dan memperluas penyerapan tenaga kerja. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mendorong permintaan agregat, mempercepat perputaran ekonomi, serta menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap sektor-sektor produktif. Peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya yang bersifat produktif, diharapkan mampu memperkuat kapasitas perekonomian daerah sekaligus menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (Rahma et al., 2025).

Dalam perspektif *Fiscal Policy Theory*, pengeluaran pemerintah menjadi salah satu bentuk kebijakan fiskal yang dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas perekonomian pada tingkat makro. Peningkatan belanja pemerintah, terutama pada sektor yang bersifat produktif, dapat mendorong permintaan barang dan jasa. Kondisi tersebut akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan memperkuat aktivitas usaha. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut akan mendorong dunia usaha untuk meningkatkan produksi dan memperluas penggunaan tenaga kerja (Olanrewaju, 2024).

Pengeluaran pemerintah yang diarahkan pada kegiatan produktif, seperti belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam mendukung penciptaan lapangan kerja. Selain memberikan dampak langsung melalui pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, pengeluaran tersebut juga menimbulkan dampak tidak langsung melalui meningkatnya aktivitas ekonomi di

sektor-sektor terkait. Pengeluaran pemerintah berpotensi menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja meningkat. Mekanisme tersebut sejalan dengan tujuan kebijakan fiskal dalam mendorong stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Zulfikar et al., 2022).

Secara empiris, pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran masih relevan dalam penelitian terkini. (Afonso et al., 2020) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal melalui peningkatan pengeluaran pemerintah berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran dengan mendorong aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Temuan ini mendukung *Fiscal Policy Theory* yang menekankan peran aktif pemerintah dalam menstimulasi perekonomian dan menekan tingkat pengangguran.

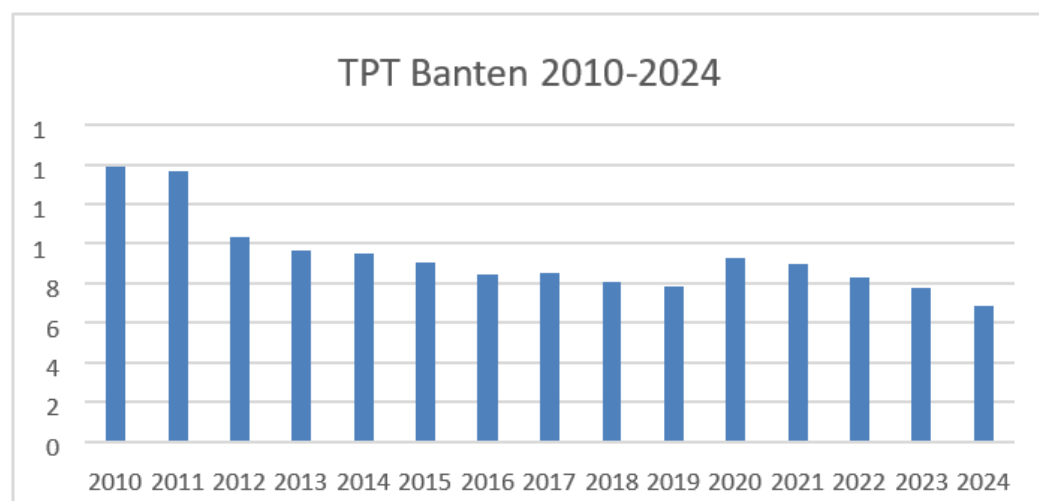
Perbedaan tingkat pengangguran antarwilayah tidak dapat dilepaskan dari variasi struktur ekonomi, konsentrasi sektor unggulan, serta karakteristik pasar tenaga kerja di masing-masing daerah. Wilayah dengan dominasi sektor industri dan jasa cenderung menghadapi tantangan penyerapan tenaga kerja yang berbeda dibandingkan daerah berbasis pertanian, terutama ketika pertumbuhan kesempatan kerja tidak sejalan dengan peningkatan angkatan kerja. Kondisi tersebut menyebabkan pengangguran menjadi persoalan yang bersifat struktural dan kontekstual, sehingga memerlukan analisis pada tingkat wilayah (Sari et al., 2020).

Provinsi Banten merupakan salah satu daerah dengan karakteristik perekonomian yang kompleks, ditandai oleh dominasi sektor industri pengolahan dan jasa serta kedekatan geografis dengan pusat pertumbuhan nasional. Namun

demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi belum tentu mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal. Kondisi tersebut dapat menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih berada pada tingkat yang cukup tinggi (Sari et al., 2020).

Selain itu, keberhasilan kebijakan ekonomi daerah dalam mengurangi pengangguran juga bergantung pada kemampuan pemerintah daerah mengelola investasi serta memanfaatkan anggaran publik secara efektif. Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah bersama investasi dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat daerah, namun dampaknya terhadap pengangguran sangat bergantung pada struktur ekonomi dan kualitas implementasi kebijakan di masing-masing wilayah (Nurjanah et al., 2021). Penelitian ini menjadikan Provinsi Banten sebagai wilayah kajian untuk menganalisis pengaruh inflasi, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Gambar 1. 2. TPT Provinsi Banten Tahun 2010-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2010-2024 (Data Diolah)

Pada grafik tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Kondisi

tersebut mengindikasikan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi daerah. Meskipun demikian, tingkat TPT Provinsi Banten masih tergolong tinggi dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengangguran masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius karena belum sepenuhnya dapat diatasi melalui mekanisme pasar maupun kebijakan pemerintah daerah (Khoiriyah et al., 2025).

Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan bahwa permasalahan pengangguran di Provinsi Banten dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi. Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kondisi tersebut adalah inflasi. Perubahan tingkat inflasi dapat memengaruhi daya beli masyarakat, biaya produksi, serta keputusan pelaku usaha dalam melakukan ekspansi usaha dan penyerapan tenaga kerja. Selain inflasi, investasi juga memiliki peran penting karena mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kegiatan usaha, dan menciptakan kesempatan kerja baru. Pengeluaran pemerintah sebagai instrumen kebijakan fiskal diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta berbagai program padat karya yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Nurjanah et al., 2021).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Secara simultan inflasi dan investasi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia, meskipun secara parsial inflasi berpengaruh positif signifikan sedangkan investasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan

(Handayani et al., 2020). Sementara itu, penelitian Hidayat et al. (2022) menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, sedangkan investasi memberikan pengaruh terhadap tingkat pengangguran sehingga menunjukkan adanya perbedaan hasil empiris yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian Sari et al. (2026) juga menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah belum tentu mampu menurunkan pengangguran apabila alokasi belanja belum diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dan padat karya

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kondisi tersebut adalah inflasi. Perubahan tingkat inflasi dapat memengaruhi daya beli masyarakat, biaya produksi, serta keputusan pelaku usaha dalam melakukan ekspansi usaha dan penyerapan tenaga kerja (Mankiw, 2019). Selain inflasi, investasi juga memiliki peran penting karena mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kegiatan usaha, dan menciptakan kesempatan kerja baru (Nurjanah et al., 2021). Di sisi lain, pengeluaran pemerintah sebagai instrumen kebijakan fiskal diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta berbagai program padat karya yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Keynes, 1936).

Penelitian ini berfokus pada Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi dengan karakteristik ekonomi berbasis industri yang memiliki tingkat pengangguran relatif tinggi (Novella et al., 2023). Analisis dilakukan menggunakan data time series periode 2010-2024 sehingga mampu menggambarkan dinamika perekonomian dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis pengaruh inflasi, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten dengan

menggunakan data terkini. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan peran pengeluaran pemerintah, khususnya melalui alokasi belanja yang bersifat produktif seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor padat karya, dan program penciptaan lapangan kerja, dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih representatif serta melengkapi keterbatasan penelitian sebelumnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan data mengenai latar belakang di atas, ditemukan beberapa rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu:

1. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten tahun 2010-2024?
2. Apakah Investasi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2010-2024?
3. Apakah Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2010-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten selama periode 2010-2024.
2. Menganalisis pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten selama periode 2010-2024.
3. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten selama periode 2010-2024.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten ditetapkan sebagai variabel dependen yang dikaji, sementara inflasi, investasi, beserta pengeluaran pemerintah difungsikan sebagai variabel independen. Guna menelaah dampak empiris dari ketiga variabel independen tersebut terhadap TPT, batasan analisis difokuskan secara khusus pada cakupan wilayah Provinsi Banten. Pengujian ini menggunakan data sekunder berjenis deret waktu (*time series*) berskala tahunan selama rentang periode 2010-2024, yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai instansi terkait lainnya. Sebagai bentuk pembatasan ruang lingkup, evaluasi mendalam mengenai implementasi kebijakan pemerintah tidak diikutsertakan dalam pembahasan, begitu pula dengan telaah terhadap berbagai faktor eksternal di luar variabel utama yang berpotensi memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ekonomi pembangunan dan ketenagakerjaan. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya bukti empiris mengenai pengaruh inflasi, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), khususnya pada tingkat regional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti selanjutnya yang mengkaji hubungan antara variabel-variabel makroekonomi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), terutama menggunakan data time series pada tingkat provinsi.